

DIVISI PENDIDIKAN PERHIMPUNAN MAHASISWA PAPUA JERMAN

PMP **BUP**

proudly present

LOMBA MENULIS

critical essay & inspirational story

FREE BIAYA REGISTRASI

TEMA:

Critical Essay - Penanggulangan Sampah Plastik
- Penangkapan Ikan Secara Liar
- Peningkatan Kualitas Pendidikan di Daerah Terpencil

Inspirational Story Bebas

SYARAT & KETENTUAN:

- Peserta *critical essay* adalah pelajar SMA/ sederajat, Mahasiswa/i, dan Pekerja/ Masyarakat Umum. Peserta *inspirational story* adalah pelajar SMP sampai SMA/ sederajat (semua peserta bersifat individu).
- Peserta wajib mem-follow instagram resmi PMP Jerman @pmp_de (tidak diwajibkan untuk pelajar SMP)
- Naskah yang dikirim adalah Karya Asli yang belum pernah menjadi Juara dan tidak sedang diikuti dalam lomba lain.
- Form Registrasi dan Panduan Lengkap silahkan akses di website resmi PMP Jerman www.pmpjerman.org.

HADIAH:

Critical Essay
Juara 1 : Piagam & uang pembinaan
Juara 2 : Piagam & uang pembinaan
Juara 3 : Piagam & uang pembinaan

Inspirational Story
Juara 1 : Piagam & uang pembinaan
Juara 2 : Piagam & uang pembinaan
Juara 3 : Piagam & uang pembinaan

Semua peserta lomba mendapatkan e-sertifikat.

Essay pemenang akan dipublikasikan di website PMP Jerman.

Kumpulan Cerita akan diterbitkan dalam sebuah buku kumpulan cerita inspirasi.

TIMELINE:

- 22 Februari - 25 Maret 2021**
Registrasi dan Pengiriman Naskah
- 26 Maret - 2 April 2021**
Penilaian
- 3 April 2021**
Webinar dan Pengumuman Pemenang

Narahubung via Chat WA:
+49 160 94842632
+49 176 85158728

Supported by:

Media Partner:

[pmp_de](https://www.instagram.com/pmp_de) [Pmp Jerman](https://www.facebook.com/PmpJerman) www.pmpjerman.org

Pemenang Lomba Menulis Critical Essay

Nama Pemenang

- 1 *Sultan Hadi Prabowo*
- 2 *Embun Ayudya Pawestri*
- 3 *Jhonny Kosamah, dan Wahyudin*

April 2021

Juara 1

"Aplikasi ELWASTE (Electronic Waste) Sebagai Solusi Distribusi Sampah Elektronik dan Edukasi EST (Engineering, Science, and Technology) di era Society 5.0"

oleh Sultan Hadi Prabowo (Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia)

Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan virus covid 19 sebagai pandemi global. Hal ini berdampak terhadap banyak sektor kehidupan. Pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah demi menekan penyebaran virus covid-19. Hal tersebut juga berdampak pada sarana komunikasi, sebagaimana biasanya komunikasi dapat dilakukan secara langsung, namun dikarenakan imbauan untuk *physical distancing*, maka hampir semua aktivitas di berbagai sektor kehidupan, dilakukan secara online.

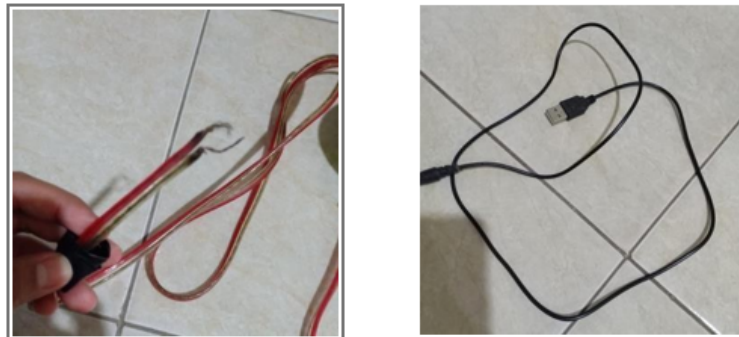


Salah satu hal yang dapat disyukuri dari musibah pandemik ini adalah, kemajuan teknologi, dan didorong oleh perubahan masyarakat industri ke masyarakat industri teknologi dan informasi. Perubahan yang drastis tersebut ditandai dengan keadaan yang serba tidak pasti dan perubahan yang sangat cepat. Seorang ahli ekonomi dan industri mengenalkan istilah disrupsi. “Disrupsi adalah istilah untuk keadaan yang sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perubahan keadaan industri berawal dari perkembangan teknologi informasi yang telah berubah secara cepat” (Subasman, 2018).

Dukungan teknologi informasi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perkembangan komunikasi di era society 5.0. Dalam sebuah survey mengungkapkan bahwa perubahan tatanan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi berubah sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. “Bidang pengguna media sosial yang secara konvensional terjadi percepatan yang melesat tajam dalam penggunaan komunikasi sosial aktif lewat media elektronik”(S. A. Astuti, 2020).

April 2021

Penggunaan elektronik dengan intensitas yang tinggi secara massif, menyebabkan menurunnya efisiensi alat tersebut, sehingga menyebabkan kerusakan. Alat elektronik yang sudah berkurang efisiensinya seringkali ditinggalkan atau dibuang (**Gambar 1**). Dengan perkembangan industri teknologi elektronik yang sangat cepat menawarkan berbagai macam pilihan produk. “Percepatan pertumbuhan tersebut dikombinasi dengan produk yang cepat usang karena produk generasi yang lebih baru sudah muncul lagi” (W. Astuti, 2020). Hal tersebut menyebabkan penumpukan sampah yang tidak terkendali.

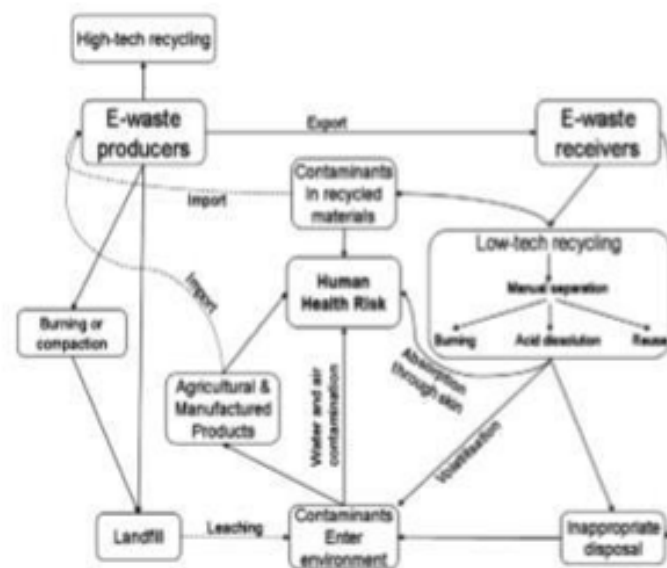


Sumber : Dokumentasi pribadi penulis

Gambar 1. Kabel yang tidak berfungsi, dan akhirnya menjadi sampah elektronik

Menurut United Nations Environment Program (UNEP), meningkatnya pemakaian barang-barang elektronik berimplikasi pada peningkatan jumlah sampah elektronik yang saat ini terjadi. Peningkatan yang signifikan diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga 200-400 persen pada tahun 2020 jika dibandingkan kondisi tahun 2007. “Sampah Elektronik atau Electronic Waste adalah dampak yang dihasilkan dari penggunaan barang elektronik secara massif di era teknologi informasi” (Pasha, 2020). E-waste sangat berbahaya apabila tidak ditangani dengan baik, karena merujuk PP Nomor 18 Tahun 1990 PP No 85/1999, E-waste bersifat toksik karena komponennya mengandung logam yang termasuk sebagai bahan beracun dan berbahaya (B3) antara lain timbal, berilium, merkuri, kadmium, kromium, arsenik, BFRs (Brominated Flame Retardants) yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan lingkungan (**Gambar 2**).

April 2021



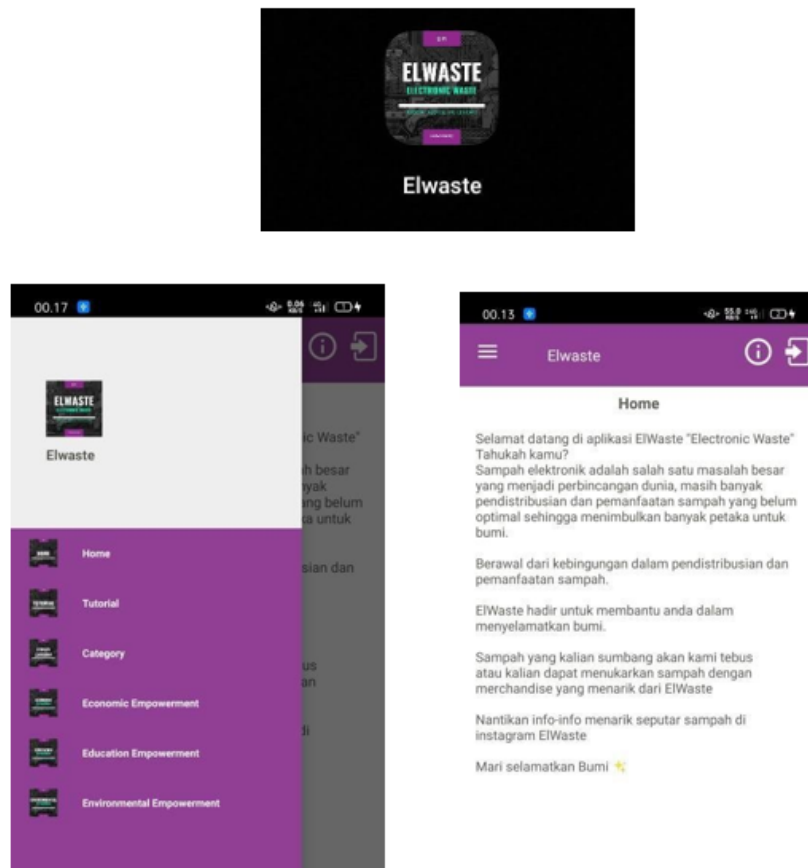
Source : Dampak Kandungan Logam Berat Dalam Sampah Elektronik (E Waste) Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan (W. Astuti, 2020).

Gambar 2. Fluxes of contaminants associated with E-waste

Berangkat dari permasalahan sampah elektronik dan mengintegrasikan dengan kemajuan teknologi terkini dan dapat dijangkau oleh masyarakat, penulis menemukan sebuah inovasi untuk ikut andil dalam misi penyelamatan bumi dengan “Aplikasi ELWASTE (Electronic Waste) Sebagai Solusi Distribusi Sampah Elektronik dan Edukasi EST (Engineering, Science, and Technology) di era Society 5.0”. Langkah konkret dari penulis adalah membuat aplikasi yang dapat digunakan di handphone dengan sistem operasi android. Aplikasi yang penulis buat bernama “ELWASTE” yang merupakan singkatan dari **Electronic Waste** (Gambar 3). ELWASTE mempunyai tiga program unggulan, yaitu economic empowerment, environmental empowerment serta education empowerment,

Dalam economic empowerment, “Generation of solid waste is a natural consequence of human life. Removal of that waste is consistent with improved quality of life.”(Shekdar, 2009), Dengan adanya inovasi aplikasi ini dapat menjadi penyalur antara masyarakat yang mempunyai sampah elektronik dengan komunitas pengolah sampah agar sampah-sampah tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan jenisnya. Dengan demikian, sampah yang ada di sekeliling kita dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan menyediakan bahan untuk di olah ulang dan akan menghasilkan pundi-pundi rupiah.

April 2021



Sumber : Dokumentasi pribadi penulis

Gambar 3. Tampilan Aplikasi ELWASTE (Electronic Waste)

Pengguna dapat menghubungi lewat aplikasi ELWASTE, dan sampah elektronik akan di ambil sesuai dengan waktu yang telah pengguna aplikasi tentukan, lalu klik sampah yang akan dibuang, klik "Pesan Jasa", isi form yang telah disediakan, seperti tanggal (tanggal pengambilan sampah),jam (waktu pengambilan sampah),nomor HP (kontak yang dapat dihubungi),tipe pembayaran (jenis via pengambilan (via kurir atau COD), lokasi (lokasi pengambilan sampah apabila dilakukan COD), klik "Kirim pesan", lalu tunggu konfirmasi dari ELWASTE. Setelah itu pengguna dapat melakukan komunikasi dengan admin atau petugas yang akan mendistribusikan sampah tersebut melalui fitur pesan dalam aplikasi. Tunggu beberapa saat maka pihak ELWASTE akan mengambil sampah. Administrator ELWASTE akan menerima pesan dan segera menjemput sampah pengguna aplikasi ELWASTE. Setelah kami mengumpulkan sampah sesuai jenisnya dari beberapa pengguna aplikasi ELWASTE, kami akan mengolah atau menyalurkannya kepada beberapa komunitas penggiat pengolahan sampah.

April 2021

Dalam environmental empowerment ELWASTE dapat dilihat dari pemanfaatan sampah elektronik. “Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kembali komponen bekas (*reuse*), menggunakan komponen dengan ditambah proses manufaktur (*remanufacture*), dan mendaur ulang (*recycle*)” (Pasha, 2020). Hal ini juga membawa dampak sosial yang positif yaitu pekerjaan baru bagi komunitas pengepul yang datang ke rumah-rumah penduduk (*end-user*) yang bertujuan untuk membeli sampah elektronik masyarakat yang bekas dan tidak dipakai lagi. Sebagian dari hasil pembelian oleh pengepul pertama ini dijual lagi ke pengepul tingkat lanjut untuk dilakukan pembongkaran dan pemisahan berdasarkan kesamaan material. Sebagian lagi ditawarkan kepada pihak usaha bengkel reparasi dan jasa servis. Untuk yang terakhir ini, sebagian komponen dan rakitan digunakan kembali (*reuse*) secara langsung sebagai barang dan atau dilakukan proses manufaktur kembali (*remanufacturing*) untuk mendapatkan produk “bekas yang baru” yang masih layak dipakai.

Dalam education empowerment, aplikasi ELWASTE memberikan edukasi kepada masyarakat terutama siswa untuk mengolah sampah elektronik menjadi barang yang bermanfaat, menggunakan konsep fisika, yaitu sistem kelistrikan dan magnet. Contohnya kabel putus yang dimanfaatkan menjadi kabel terminal menggunakan alat alat sederhana disekitar kita (**Gambar 4**). Hal ini didukung oleh pendekatan pembelajaran EST (Engineering, Science, and Technology). The EST education has become a wellknown approach among educators due to the improvement of the global technology perspective of the 21st century (W.Sumarni and S.Kadarwati, 2020).



Sumber : Dokumentasi pribadi penulis

Gambar 4. Pemanfaatan sampah elektronik menjadi barang yang dapat dipakai kembali

April 2021

Metode pembelajaran dilakukan lewat pemberian video tutorial memanfaatkan sampah elektronik, atau prosedur membuat suatu barang yang dimanfaatkan dari sampah elektronik. The STEM approach enables students to solve problems better. Moreover, they also would be able to become innovators, inventors, independent workers, logical thinkers, and technology literacy (W.Sumarni and S.Kadarwati, 2020). One main goal of EST education is to develop more future skilled workers and innovators in EST fields (Luo et al., 2019).

Aplikasi ELWASTE masih dalam tahap pengembangan dan perlu adanya perbaikan serta bantuan beberapa pihak agar permasalahan sampah elektronik segera teratasi untuk Indonesia menghadapi tantangan global khususnya di era disrupsi.

April 2021

Daftar Pustaka

- Astuti, S. A. (2020) '*Era Disrupsi Teknologi 4.0 Dan Aspek Hukum Perlindungan Data Hak Pribadi*', 01, pp. 1–32.
- Astuti, W. (2020) '*Dampak Kandungan Logam Berat Dalam Sampah Elektronik (E Waste) Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan*'.
- Luo, T. *et al.* (2019) '*Development and application of a scale to measure students' STEM continuing motivation*', *International Journal of Science Education*. Taylor & Francis, 41(14), pp. 1885–1904. doi: 10.1080/09500693.2019.1647472.
- Pasha, R. F. (2020) '*Identifikasi Karakteristik Sampah Elektronik (E-Waste) Dan Implikasinya Pada Kebijakan Daerah Di Kota Yogyakarta*'.
- Shekdar, A. V (2009) '*Sustainable solid waste management: An integrated approach for Asian countries*', *Waste Management*. Elsevier Ltd, 29(4), pp. 1438–1448. doi: 10.1016/j.wasman.2008.08.025.
- Subasman, I. (2018) '*Peran evaluasi pendidikan pada era disrupsi*'.
- W.Sumarni and S.Kadarwati (2020) '*Ethno-Stem Project-Based Learning: Its Impact To Critical Thinking Skills*', *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 9(1), pp. 11–21. doi: 10.15294/jpii.v9i1.21754.

April 2021

Juara 2

GURU PELITA : PROGRAM WAJIB MENGAJAR DAERAH 3T PADA JENJANG PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH TERPENCIL

oleh Embun Ayudya Pawestri (Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta)



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1.202.402 guru menumpuk di Pulau Jawa dimana 370.757 diantaranya terdapat di Provinsi DKI Jakarta (Slamet,2020). Data tersebut telah jauh memenuhi rasio ideal jumlah guru setiap provinsi yakni 1 : 28 antara guru dan siswa, Muhajir Effendy pada Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan (LPTK) mengemukakan bahwa setiap tahun terdapat 300.000 lulusan guru akan tetapi hanya terserap 120.000 lulusan ke lembaga pendidikan (Ali.2019). Pernyataan data diatas hanya terjadi di Indonesia barat seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan rasio melebihi 1 : 28 guru setiap provinsi (Linggasari,2014). Hal ini sangat memilukan melihat bahwa banyak tenaga pendidik justru memilih untuk mengabdikan diri di kota – kota besar dengan alasan jaminan karir dan masa depan. Sedangkan angka guru di Indonesia bagian timur khususnya Papua tidak lebih dari 50.000 guru (Slamet, 2020).

April 2021

Ketimpangan pendidikan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur tidak hanya ditunjukkan dari jumlah guru saja melainkan pada kualitas dan mutu pendidikannya. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, menyatakan bahwa pada 2020 Provinsi Papua masih terdapat 26,95% masyarakat buta huruf, angka ini sangat timpang dengan DKI Jakarta dengan angka buta huruf hanya mencapai 0,71% (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini sangat menunjukkan adanya ketimpangan mutu pendidikan yang sangat signifikan. Masalah utama dari kegagalan pemerataan pada daerah terpencil bukanlah pada program melainkan pada kemauan dari tenaga pendidik itu sendiri yang rendah akan kemauan untuk mengabdikan diri pada dunia pendidikan khususnya di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar).

Guru banyak memilih untuk mengajar di daerah kota dengan pertimbangan karir dan fasilitas yang memadai (Linggasari, 2014). Padahal pada kenyataannya guru di daerah kota sudah memiliki jaminan karir yang mumpuni, ditambah dengan mudahnya perolehan Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta akses CPNS yang lebih diprioritaskan. Selain itu Guru yang telah memiliki sertifikasi mengajar dalam jenjang pendidikan profesi guru (PPG) lebih mudah untuk mendapat tunjangan profesi Menurut Pasal 1 Ayat (4) PP Nomor 41 Tahun 2009 menyatakan bahwa nominal TPG adalah 1 kali gaji guru yang diberikan setiap triwulan sekali, dimana jika guru merupakan lulusan S1 maka gaji yang diperoleh mencapai Rp2.579.400 – 4.236.400 (Idris, 2020).

Guru yang telah menempuh PPG selain memperoleh karir yang menjanjikan seharusnya juga dapat mengimplementasikan 4 kompetensi dasar seorang guru untuk menyakinkan sertifikasi profesionalnya betul – betul bernilai. Empat kompetensi dasar seorang guru meliputi Pedagogik, Kepribadian, Sosial, dan Profesional (Sutriyono, 2020). Jenjang PPG sebetulnya hanya menilai aspek Pedagogik dan Sosial saja sedangkan aspek Kepribadian dan Profesional belum terimplementasi khususnya pada kemauan untuk mengajar di daerah 3T. Kemauan untuk betul – betul mengabdikan pada pendidikan di seluruh pelosok Indonesia sama sekali tidak ditampilkan dari lulusan PPG seluruh Universitas di Indonesia. Padahal guru – guru di kota yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi jika dibandingkan dengan guru di daerah 3T justru lebih memiliki kemauan untuk mendidik adalah guru – guru di daerah 3T (Laksono, 2017).

April 2021

Hal ini seharusnya menjadi kritik yang tajam bagi pelaksanaan PPG di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, dimana lulusan dari program ini justru tidak menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dengan indikator memiliki kemauan mendidik dimanapun dengan siapapun yang diajar. Kemauan untuk membangun negeri dibidang pendidikan masih rendah dan belum terasah. Oleh karena itu pada jenjang pendidikan ini seharusnya terhadap program khusus untuk melatih guru dalam mengajar dalam kondisi darurat, fasilitas terbatas, dan keadaan yang sulit.

Gagasan penulis sebagai solusi dari permasalahan yang ada adalah Guru Pelita. Guru Pelita adalah program pengabdian guru dengan wajib mengajar daerah 3T di seluruh Indonesia dengan masa mengajar 3 bulan untuk memperoleh Sertifikat Pelita sebagai syarat wajib bagi calon guru yang ingin mendaftar PNS dan mendapat sertifikasi serta Tunjangan Profesi Guru. Dengan demikian seluruh guru di Indonesia akan terikat secara hukum dan resmi dengan peraturan wajib mengajar di daerah 3T pada jenjang Pendidikan Profesi Guru (PPG).

B. Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan ide dan gagasan bagi permasalahan pendidikan di daerah terpencil Indonesia
2. Memberikan solusi bagi masalah pendidikan di daerah terpencil melalui program Guru Pelita
3. Memberikan wacana baru bagi masyarakat mengenai gagasan Guru Pelita sebagai model implementasi pemerataan guru di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi pendidikan di daerah terpencil Indonesia?
2. Bagaimana solusi yang pernah ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan di daerah terpencil Indonesia?
3. Bagaimana program Guru Pelita sebagai solusi bagi masalah pendidikan di daerah terpencil Indonesia?

April 2021

D. Metode Penulisan

Metode dalam penulisan ini menggunakan teknik studi literatur dan kepustakaan untuk memperoleh data yang relevan dan teori yang linear dengan topik bahasan. Menurut Moleong (2012) studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan informasi atau referensi dari hasil penelitian yang sudah ada dan pernah dilakukan mengenai topik masalah yang hampir sama sehingga ada pembandingan atau penguatan analisis. Kepustakaan digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Karya tulis ini menggunakan data – data dari penelitian terdahulu, buku, jurnal, skripsi, tesis, laman resmi, dan berita online yang relevan.

II. PEMBAHASAN

A. Kondisi Pendidikan di Daerah Terpencil Papua

Pendidikan di daerah terpencil dapat dilihat dari terbatasnya tenaga pendidik maupun sarana prasarana, sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaranpun kurang kondusif karena setiap guru memiliki jam mengajar bahkan lebih dari 24 jam dalam 1 minggu (Firdaus, 2018). Daftar daerah terpencil di Indonesia dengan pendidikan kurang didominasi oleh Provinsi di Indonesia Timur seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua (Suliyannah,2018). Kurikulum pendidikan yang masih berbasis nasional juga belum sesuai dengan kompetensi dari masing – masing siswa di daerah terpencil. Hal ini ditunjukkan dari banyak siswa daerah terpencil kesulitan mengikuti standar assesmen pendidikan nasional (Haq,2019). Jumlah tenaga pendidik yang mengajar tetap di sekolah – sekolah Provinsi Papua terdata per 2020 tidak mencapai 50.000 tenaga pendidik tetap (Slamet,2020). Selain itu faktor politik, ekonomi, dan kesadaran melek pendidikan masih menjadi pengaruh utama pada motivasi belajar siswa di Provinsi Papua (Anjaryani, 2019).

B. Kritik Solusi Yang Pernah Ditawarkan

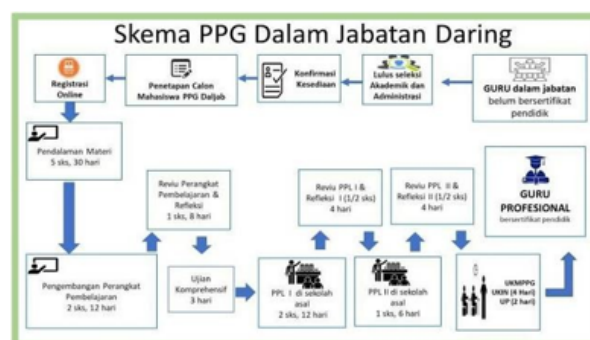
Solusi yang pernah dilakukan oleh pemerintah adalah program – program afirmasi untuk mendistribusikan tenaga pendidik yakni guru ke daerah – daerah terpencil. Beberapa program yang pernah ditawarkan oleh pemerintah meliputi program 1) Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T); 2) Program Guru Garis Depan (GGD), dan Guru yang bertugas di daerah khusus; 3) Program Sertifikasi Keahlian

April 2021

4) Program Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan Konversi GTK PAUD dan DIKMAS; 5) Program Diklat Berjenjang bagi Pendidik PAUD (Kemdikbud, 2017). Pelaksanaan program yang tidak bersifat mengikat seorang calon guru dalam mengembangkan kompetensi dasarnya juga menjadi kritik khusus dalam pelaksanaan program ini. Bahkan fakta lapangan program GGD mengalami kegagalan akibat banyak guru GGD yang memilih mengundurkan diri dari penugasan pada tahun pertama (Syam, 2017). Bahkan program SM 3T yang bertujuan mengajak calon guru muda dengan kompetensi sarjana justru rendah minat di Provinsi dengan pendidikan terbaik di Indonesia yakni DKI Jakarta (Wahyuni,2013). Sehingga dari banyaknya kegagalan program yang dilakukan pemerintah menjadi kritik khusus dalam penyusunan program yang seharusnya menjadi bagian di pelaksanaan satuan pendidikan seperti jenjang pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat khusus memperoleh akta lulus sertifikasi profesi.

C. Guru Pelita : Program Wajib Mengajar 3T Bagi Jenjang Pendidikan Profesi Guru

Kritik pelaksanaan program pemerintah dalam upaya pemerataan tenaga pendidik di daerah terpencil Indonesia. Guru Pelita menjadi program yang tidak jauh beda dengan program yang dicanangkan pemerintah akan tetapi Guru Pelita merupakan program pengabdian khusus yang ditujukan dan diimplementasikan pada satuan pendidikan Perguruan Tinggi jenjang PPG. Guru Pelita menjadi sks syarat kelulusan untuk guru yang sedang mengenyam pendidikan di jenjang PPG, sehingga program pengabdian ini bersifat terikat untuk syarat kelulusan sertifikat profesi bagi guru. Pelaksanaan program gagasan Guru Pelita mencakup 6 sks kelulusan, program ini merefleksikan pada program KKN pada jenjang pendidikan sarjana. Berikut adalah skema PPG pada masa pandemi.



Gambar 1. Skema Pelaksanaan PPG

Sumber : unnes.ac.id

April 2021

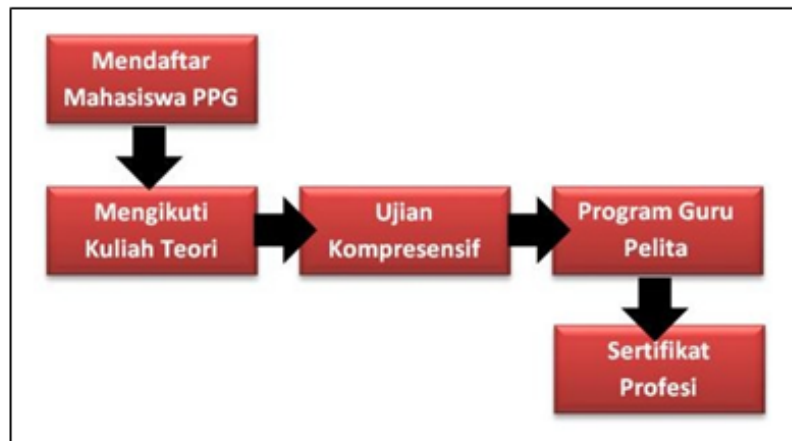
Beban pelaksanaan PPG adalah sedikitnya 24 sks sampai dengan 40 sks. Pada program Guru Pelita tahap PPL di sekolah sebanyak 3 sks diganti menjadi Program Guru Pelita sebanyak 6 sks dengan mengajar di daerah terpencil di Indonesia. Pembagian penugasan mengajar di daerah terpencil didasarkan pada jarak daerah dan pengalaman mengajar. Program Guru Pelita tidak hanya menekankan pada pemerataan saja melainkan pada penilaian aspek kompetensi profesional guru untuk mengajar dimanapun dan dengan siapapun siswanya. Guru Pelita berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dengan model pembelajaran *contextual learning* pada siswa di daerah terpencil dan mengedepankan kompetensi literasi dan numerasi. Pembelajaran *contextual learning* menuntut guru untuk dapat mengimplimentasikan kemampuan pedagogiknya pada pembelajaran berbasis kehidupan sehari – hari, alam, dan kebutuhan bertahan hidup lainnya.

Program Guru Pelita dilaksanakan selama 3 bulan karena disesuaikan dengan jumlah mahasiswa PPG yang akan berotasi dan bergantian dalam mengajar, diharapkan setiap guru memiliki kemampuan menginovasikan proses pembelajaran dengan menyenangkan dan antusias serta mengedepankan *contextual learning*. Program Guru Pelita digagas dengan dasar bahwa sebagian besar guru yang telah lulus dari PPG dan memiliki kompetensi yang mumpuni justru enggan untuk mengajar di daerah terpencil. Hal ini harus dilakukan keterikatan antara pelaksanaan program pada syarat administrasi jenjang karir sehingga program yang dilaksanakana bukan hanya mengedepankan suka rela melainkan betul – betul mengukur profesionalisme seorang calon guru dalam mendidik, mengajar, dan mengabdikan pada dunia pendidikan di Indonesia khususnya daerah terpencil. Pada pelaksanaan program Guru Pelita di jenjang PPG dibagi menjadi 2 kategori sebagai berikut :

1. Guru Pelita Prajabatan

Program guru pelita prajabatan adalah program jenjang Pendidikan Profesi Guru yang ditujukan pada mahasiswa jenjang sarjana yang belum memiliki rekognisi pengalaman mengajar di lembaga pendidikan. Sehingga pelaksanaan PPG pada Pra Jabatan meliputi 6sks Guru pelita dan 34sks teori terkait pengembangan kompetensi dasar seorang guru untuk mendapat sertifikat profesional. Alur dalam pelaksanaan Guru Pelita pada **Gambar 2**.

April 2021



Gambar 2. Alur pelaksanaan program Guru Pelita di jenjang PPG

2. Guru Pelita Dalam Masa Jabatan

Program guru pelita prajabatan adalah program jenjang Pendidikan Profesi Guru yang ditujukan pada guru yang telah memiliki pengalaman menajar di lembaga pendidikan. Sehingga pelaksanaan PPG dalam Jabatan meliputi 6 sks Guru Pelita dan 18 sks teori terkait pengembangan kompetensi dasar seorang guru untuk mendapat sertifikat profesional.

3. Sertifikat Profesi

Sertifikat profesi yang diperoleh dari serangkaian pendidikan jenjang PPG termasuk pada pengalaman lapangan yakni Guru pelita dapat digunakan untuk mendaftar CPNS dan memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sehingga dengan adanya tambahan program pada jenjang PPG diharapkan dapat menghasilkan guru – guru dengan profesionalisme dalam pengalaman.

April 2021

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketimpangan pendidikan di Indonesia bagian barat dan timur dapat dilihat dari angka buta huruf. Badan Pusat Statistik (2020) mencatat bahwa angka buta huruf di Papua mencapai 26,95% sedangkan angka buta huruf di DKI Jakarta hanya 0,71%. Jumlah tenaga pendidik di DKI Jakarta mencapai 370.757 guru sedangkan tenaga pendidik di daerah Papua kurang dari 50.000 guru. Kritik pada pelaksanaan PPG adalah tidak adanya sks yang mendorong guru pada aspek profesionalisme mengajar di daerah terpencil, sehingga muncul gagasan penulis yakni Guru Pelita. Guru Pelita menjadi pengganti pelaksanaan PPL pada program PPG yang hanya menggunakan 3 sks saja. Guru Pelita menggunakan 6 sks dalam pelaksanaannya sehingga pengalaman mengajar guru dimanapun dengan siswa siapapun dapat lebih terukur. Dengan program Guru Pelita seorang calon guru akan wajib mengajar daerah terpencil di Indonesia selama 3 bulan. Sehingga menghasilkan guru profesional secara pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

B. Rekomendasi

Dari gagasan karya tulis yang disampaikan maka rekomendasi yang dapat disimpulkan adalah :

1. Program Guru Pelita harus memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Kemdikbud, atau Surat Keputusan Menteri
2. Program Guru Pelita dapat diimplementasikan pada seluruh program studi linear untuk membantu upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah terpencil
3. Program Guru Pelita diajukan sebagai program resmi Kemdikbud pada jenjang pendidikan PPG.

April 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nur. 2019. Kementrain Sorot Banyaknya Lulusan Guru Yang Menganggur. *Siedoo.com*. Diakses pada 20 Maret 2021. Tersedia di : <https://siedoo.com/berita-24632-kementerian-sorot-banyaknya-lulusan-guru-yang-menganggur/>
- Anjaryani, A. 2019. Motivasi Belajar Pada Siswa Asli Papua Terhadap Implementasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 4(1) : 120 - 125
- Badan Pusat Statistik. 2020. Presentase Penduduk Buta Huruf (Persen). *Bps.go.id*. Diakses pada 25 Maret 2021. Tersedia di : <https://www.bps.go.id/indicator/28/102/1/persentase-penduduk-buta-huruf.html>
- Firdaus. 2018. Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil. *Jurnal Sociology Education*. 6(1) : 34 – 43
- Haq, Syaiful. 2019. Evaluation of Teacher Professional Education Program (PPG) Teaching Graduates in Edge Area, Front Area, And Left Area Of Indonesia (SM 3T) Of Universitas Negeri Padang. *International Journal of Education Dynamics*. 1(2) : 301 – 307
- Idris, H. 2020. Pemasaran Berapa Besaran Tunjangan Profesi Guru. *Kompas.com*. Diakses pada 20 Maret 2021. Tersedia di : <https://money.kompas.com/read/2020/07/19/073200926/penasaran-berapa-besaran-tunjangan-profesi-guru-pns-dan-non-pns?page=all>

April 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Laksono, B. 2017. Nasib Guru Honorer di Sekolah Wilayah 3T Bila PNS dari GGD Dilarang Datang. *Budilaksono.com*. Diakses pada 20 Maret 2021. Tersedia di : <http://www.budilaksono.com/2017/06/nasib-guru-hanorer-di-sekolah-wilayah.html>
- Lingasari, Y. 2014. ICW : Guru Menumpuk di Kota, Pemerataan Gagal. *Cnnindonesia.com*. Diakses pada 23 Maret 2021. Tersedia di : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141222133801-20-19743/icw-guru-menumpuk-di-kota-pemerataan-gagal>
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Slamet.2020. Peta Tematik Jumlah Guru di Indonesia. *Kompaspedia.id*. Diakses pada 20 Maret 2021. Tersedia di : <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/jumlah-guru-di-indonesia>
- Suliyansah. 2018. Analysis of physic teacher competence in post SM 3T Teacher Education Program. *Journal Of Physic*. 11(17) : 1 -10
- Sutriyono. 2020. 4 Kompetensi Guru. *Kemdikbud.go.id*. Diakses pada 20 Maret 2021. Tersedia di : <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/4-kompetensi-guru/>
- Syam, S. 2017. Program GGD Mendapat penolakan di Tempat Kerja, Gagal?. *Pohoksatu.id*. Diakses pada 23 Maret 2021. Tersedia di : <https://pojoksatu.id/pendidikan/2017/10/20/program-guru-garis-depan-mendapat-penolakan-tempat-kerja-gagal/>
- Rigantara, S. 2016. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Alumni Jurusan Pendidikan Ekonomi Dalam Mengikuti Program SM 3T. *Jurnal Prodi Pendidikan Ekonomi*. 8(3) : 1 - 10
- Wahyuni, N. 2013. Program SM 3T di Jakarta Kurang Peminat. *Beritasatu.id*. Diakses pada 24 Maret 2021. Tersedia di : <https://www.beritasatu.com/nasional/127768/program-sm3t-di-jakarta-kurang-peminat>

April 2021

Juara 3

PENDIDIKAN DI TANAH PAPUA : MASALAH, PENYEBAB, DAN SOLUSI

oleh Jhonny Kosamah (Pelajar SMA YPPK Seminari Petrus van Diepen, Sorong)



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pendidikan di wilayah Indonesia bagian barat secara umum jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia timur. Hal ini sepintas dapat kita intip dengan membandingkan kualitas sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan. Di tanah Jawa dan sekitarnya, siswa/i belajar dengan segala kelengkapan informasi, tenaga kependidikan, dan sarana yang mumpuni. Sementara di tanah Papua dan sekitarnya, bisa dibilang agaknya masih jauh dari kata layak, seperti jauh panggang dari api. Sebab “seribu satu” masalah terus melilit dunia pendidikan yang nyata dalam kekurangan tenaga pengajar, tingginya angka putus sekolah, fasilitas yang serba berkekurangan, dan pelbagai masalah lainnya. Untuk itu, melalui tulisan sederhana ini penulis coba menguraikan permasalahan, penyebab, dan solusi terhadap beberapa persoalan mendasar yang menghambat laju pertumbuhan pendidikan di tanah Papua.

April 2021

1.2. Tujuan Penulisan

Secara umum maksud atau tujuan dari penulisan esai ini untuk melihat dan menceritakan penyebab dan realitas persoalan kehidupan masyarakat Papua yang cenderung lemah dan terbelakang dalam dunia pendidikan. Lebih dari itu, penulis coba mengkritisi persoalan-persoalan tersebut dan menawarkan sejumlah pemikiran yang barangkali dapat membantu masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi persoalan dalam dunia pendidikan di tanah Papua.

1.3. Rumusan Masalah

Dalam menguraikan pelbagai masalah, penyebab, dan solusi terhadap persoalan pendidikan di tanah Papua, maka penulis mendasari tulisan ini pada rumusan masalah sebagai berikut:

- Apa saja persoalan yang menjadi penghambat lajunya pertumbuhan pendidikan di tanah Papua?
- Apa saja penyebab atau alasan di balik permasalahan dalam dunia pendidikan pendidikan di tanah Papua?
- Bagaimana solusi atau jalan keluar yang ditawarkan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang melanda dunia pendidikan di tanah Papua?

II. ISI

Pelbagai masalah yang masih menghiasi wajah pendidikan di Bumi Cenderawasih memang begitu sulit untuk diatasi. Dalam pengamatan dan pantauan penulis selaku putera daerah dari tanah Papua, sekurang-kurangnya ada sejumlah penghambat yang menekan laju pendidikan daerah terpencil atau daerah pedalaman di tanah Papua, seperti krisis ekonomi, kondisi topografi dan konsep pemikiran dalam budaya.

Pertama, masalah di bidang ekonomi. Rumitnya persoalan di bidang ekonomi senantiasa menjadi sahabat bagi kehidupan masyarakat pedalaman di tanah Papua. Minimnya perhatian dari pemerintah, dengan keadaan orang tua yang pada umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, sudah tentu mengharuskan masyarakat untuk menggantungkan hidup pada alam demi mencarinya. Alam memang menyediakan banyak sumber kebutuhan, tetapi pemenuhan kebutuhan hidup tersebut lebih bersifat jangka pendek dan lebih dominan dilakukan dengan kerja fisik.

April 2021

Banyak anak yang akhirnya terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya dan merekapun dituntut untuk bekerja membantu orang tua. Kenyataan seperti ini yang diungkapkan dalam Berita Satu "Banyak anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga" (berita diakses pada Selasa, 18 Oktober 2016). Sekilas, kondisi ini memang menampilkan anak sekolah yang terlihat sebagai sasaran, namun inilah sebuah tuntutan hidup agar anak-anak bisa membantu mencari nafkah demi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menanggapi kenyataan miris akan krisis ekonomi di atas, penulis coba mencari dan memberikan solusi dengan menyoroti peran dan dana otonomi khusus (otsus) yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

Papua telah diberikan dana otonomi khusus (otsus) dengan nilai yang begitu besar dan fantastis. Namun, faktanya aliran dana tersebut tidak sampai dengan utuh ke tangan masyarakat. Ibarat istana negara yang menyumbang kerbau, namun karena banyaknya tangan dalam proses distribusi, maka ketika sampai di Papua, masyarakat hanya menerima semut. Daging kerbau yang besar tadi rupanya menghilang dan berubah di tengah perjalanan. Inilah kenyataan yang menunjukkan sisi lemah pengawasan dan kontrol yang belum dilakukan secara ketat terhadap pemanfaatan dana otsus.

Seyogyanya dana otsus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat kecil, bukan orang-orang besar. Penyaluran dana otsus harusnya dibaca sebagai suatu kesempatan mulia dari pemerintah pusat dalam mengeksekusi program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah pedalaman, terutama yang tertuju pada bidang pendidikan.

Untuk itu, penulis menganjurkan agar pemerintah pusat tidak hanya sekadar memberi sejumlah dana otsus, tetapi lebih dari itu harus ada kontrol dan sistem pengawasan yang ketat. Dana otsus harus sampai ke tangan masyarakat untuk membantu perekonomian hidup mereka. Adapun hal-hal praktis yang perlu dilakukan untuk mendukung pendidikan lewat jalur perekonomian ialah mendata secara valid seluruh anak sekolah dari keluarga tidak mampu, yang kemudian ditunjang dengan pemberian beasiswa. Selain itu, dana otsus juga harus dipakai untuk pembangunan fasilitas umum, terutama berkaitan dengan pendidikan, seperti mendirikan gedung sekolah, perpustakaan, dan asrama bagi para pelajar yang berasal dari daerah pedalaman.

April 2021

Kedua, kondisi topografi yang terjal di tanah Papua. Ribuan bukit dan daerah terjal di tanah Papua rupanya melahirkan kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Masyarakat pedalaman inilah yang kemudian mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pelbagai layanan publik. Pertanyaannya, apakah alam Papua memang tidak mengizinkan anak-anaknya mengenyam pendidikan? Tentu tidak, sebab keberadaan masyarakat untuk hidup di daerah pedalaman bukanlah kehendak alam, sebab alam hanya menyediakan lahan dan tempat bagi siapa saja yang ingin tinggal disana. Masyarakat daerah pedalaman sesungguhnya terlahir dari konstruksi pemikiran masyarakat itu sendiri bahwa mereka lebih nyaman tinggal jauh dari keramaian. Toh, alampun telah menyediakan segala kebutuhan hidup untuk mereka. Mereka juga memiliki kedekatan emosional yang tinggi dengan alam, sehingga wilayah pedalaman menjadi prioritas tempat tinggal.

Hal di atas kemudian melahirkan pandangan bahwa sekolah hanya akan membuang-buang waktu saja, karena alam sesungguhnya telah menyediakan segala kebutuhan hidup. Selain itu, daerah pedalaman juga merujuk pada tempat tinggal masyarakat yang saling berjauhan antara satu rumah dengan rumah lainnya. Bagaimana pemerintah dapat membangun sekolah dan pelbagai fasilitas umum apabila pola pikir masyarakat dan kenyataannya memang seperti ini?

Inilah sebuah persoalan dan kesulitan bagi pemerintah dalam membangun sekolah dan pelbagai fasilitas umum. Kalau pun pemerintah berhasil membangun sekolah, tetapi masih ada persoalan yang lain yakni kesulitan pelajar untuk menjangkau letak sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka. Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah anak sekolah di tanah Papua harus berjalan dengan mendaki gunung, menyeberangi arus sungai, mendayung dalam jarak yang cukup jauh atau pun sering berusaha untuk menghindar dari serangan binatang buas demi mengenyam pendidikan di sekolah yang sudah tersedia oleh pemerintah. Situasi ini pun tidak jarang membuat anak didik sering mempertaruhkan nyawa hanya untuk sampai di sekolah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh BBC News-Indonesia, "Kisah anak-anak Raja Ampat-Papua, arungi laut demi pendidikan dan melawan kemiskinan" (berita diakses tertanggal 2 Mei 2019). Pengaruh kondisi alam yang demikian, menyebabkan anak-anak menjadi malas pergi ke sekolah dan pemerintah kesulitan menerapkan program pendidikan yang merata.

April 2021

Menyikapi persoalan dan akar permasalahan yang terjadi ini, maka penulis menawarkan beberapa solusi. Pemerintah melalui aparaturnegara, harus turun lapangan ke daerah-daerah pedalaman untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama bagi anak-anak dan remaja selaku generasi emas bangsa. Sosialisasi tersebut harus diikuti dengan langkah konkret yakni penyediaan sekolah dan pelbagai fasilitas umum di tempat terbuka (ruang publik). Pembangunan fasilitas di tempat terbuka dan di sekitar pemukiman warga akan memudahkan pemerintah untuk melakukan kontrol sosial yang terpusat pada satu titik. Pemerintah daerah dengan bantuan dana otsus perlu membantu masyarakat dalam pembangunan asrama di dekat sekolah dan fasilitas umum tersebut, sehingga para pelajar tidak perlu jauh-jauh datang ke sekolah sebab sudah tersedia bagi mereka asrama yang menjadi tempat tinggal atau rumah kedua.

Ketiga, adanya permasalahan terkait konsep pemikiran di dalam budaya. Budaya patriarki yang secara tidak langsung melegalkan dominasi kaum pria terhadap wanita masih menjadi sebuah habitus dalam kebudayaan di tanah Papua. Anak laki-laki menjadi prioritas sedangkan anak perempuan dinomorduakan, sehingga mereka sering diperintahkan mengurus kepentingan dapur saja. Alhasil banyak anak perempuan yang putus sekolah dan menikah dalam usia yang masih dini.

Selain kesalahan konstruksi pemikiran di dalam budaya, rupanya ada pula kesalahan konsep dalam keseharian hidup masyarakat yang kaya akan hasil alam. Kekayaan alam dengan segala keindahan di tanah rupanya memanjakan masyarakat. Mengutip apa yang dituliskan dalam Berita Satu "Banyak orang papua yang malas bekerja. Mereka terlalu nyaman hidup dari mendayagunakan sumber daya alam di sekitar", (berita diakses pada Selasa, 18 Oktober 2016). Kekayaan alam yang diproduksi dengan kerja fisik membuat sejumlah masyarakat beranggapan bahwa sekolah sesungguhnya menghambat aktivitas produksi mereka. Alhasil, banyak anak yang tidak sekolah dan dipaksa membantu orang tua dalam meningkatkan taraf perekonomian keluarga dengan memproduksi hasil-hasil dari alam, seperti ikan dan lobster dari lautan serta kayu dan buah dari hutan.

Keadaan riil di atas memang menunjukkan situasi dilematis, yang mana anak dituntut untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dengan cara bekerja, sementara di sisi lain anak seharusnya berada di bangku sekolah untuk mengenyam pendidikan. Menanggapi persoalan ini, pemerintah yang bekerjasama dengan pelbagai pihak (tokoh agama, tokoh masyarakat/budaya) harus terjun ke lapangan untuk memberi sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pendidikan.

April 2021

Adapun bentuk sosialisasi yang perlu dijalankan ialah dengan mempertemukan seluruh masyarakat (anak-anak hingga orang tua) dengan orang asli papua (OAP) yang telah sukses dalam bidang pendidikan. Orang-orang inilah yang setidaknya menjadi contoh sekaligus motivator dalam membangun konsep akan pentingnya pendidikan.

Selain sosialisasi, ada pun cara lain yang perlu dilakukan ialah melibatkan secara penuh para pelajar, guru, dan pemerintah dalam setiap kegiatan atau urusan bersama, baik dalam kerja sosial, upacara adat, maupun dalam perayaan keagamaan. Para pelajar beserta semua perangkat di bidang pendidikan, harus aktif terlibat dan tampil di tengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi media untuk mempromosikan pentingnya pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat, serentak melahirkan rasa bangga dari masyarakat terutama orang tua yang melihat peran anak mereka selaku kaum intelektual dalam kehidupan bersama.

III. PENUTUP

Melalui uraian dan pembahasan di atas, penulis dengan jelas menampilkan tiga hal yang dilihat sebagai penghambat laju pendidikan di tanah Papua, yakni krisis ekonomi di dalam keluarga, kondisi topografi wilayah Papua yang rumit dan terjal, serta kekeliruan konsep berpikir masyarakat. Ketiga hal ini menjadi pemicu lahirnya sejumlah masalah bagi para pelajar dalam mengakses pendidikan yang layak. Bahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pun turut melibatkan pihak pemerintah. Untuk itu, penulis dalam setiap bagian permasalahan coba menawarkan solusi praktis yang perlu dilakukan pemerintah, masyarakat, dan setiap orang yang bergelut dalam bidang pendidikan.

Tentunya tawaran solusi-solusi di atas lebih diarahkan kepada pihak pemerintah agar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di daerah pedalaman Papua. Dengan begitu, pelbagai program yang dicanangkan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat menjadi konkret, misalnya pembangunan sekolah dan fasilitas umum yang tepat sasaran. Sedangkan dengan pelbagai bentuk sosialisasi yang ditawarkan penulis, sesungguhnya membantu pemerintah untuk membuka pikiran dan pemahaman masyarakat terhadap dunia pendidikan.

April 2021

Daftar Pustaka

<https://amp.kompas.com/edukasi/read/2011/03/11/kondisi.guru.di.pedalaman.memp.rihatinkan>

<https://www.beritasatu.com.nasional/pendidikan-masih-jadi-masalah-utama-di-papua>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48102657>

April 2021

Juara 3

... LALU, APA MANFAAT PENDIDIKAN FORMAL UNTUK DAERAH TERPENCIL?

oleh Wahyudin (Peneliti pendidikan berbasis kearifan lokal di Kofarkor Foundation dan guru di SMP Sekolah Anak Indonesia)

Dalam proses berlangsungnya kehidupan, manusia tumbuh dan berkembang peradabannya diawali dari kesadaran pikir dan hatinya. Dalam proses tumbuh dan berkembangnya peradaban manusia, pendidikan berperan sebagai bahan bakar yang digunakan oleh manusia untuk bergerak mereformasi kehidupannya, entah itu secara individu atau pun secara kolektif.

Membicarakan pendidikan hari ini, dalam konteks kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia, selalu bermuara pada standarisasi pendidikan formal, padahal sejarah panjang kita sebagai manusia yang berbudaya,



memberikan gambaran bahwa proses pendidikan sudah dimulai sejak nenek moyang kita mengawali kehidupan di nusantara. Nenek moyang kita telah mengajarkan secara turun-temurun mengenai keterampilan hidup yang selaras dan mampu beradaptasi dengan alam. Proses pendidikan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, sering kita lupakan hari ini, karena narasi tentang pendidikan selalu terfokus pada pendidikan formal.

Di daerah-daerah terpencil, seperti misal di Pulau Reni, Kepulauan Ayau, Raja Ampat, seorang anak yang baru berumur 8 tahun, sudah mampu menggunakan kalaway (alat menikam ikan di laut) untuk mendapatkan ikan saat air laut sedang surut. Ada juga seorang anak laki-laki berusia 9 tahun di Kampung Sona, Distrik Sawa Erma, Asmat, yang telah terbiasa membuat ukiran yang indah pada tiang rumahnya. Atau seorang anak perempuan usia 10 tahun dari kampung Purigi, Distrik Kanggime, Tolikara, yang sudah mengerti bahwa petatas (ubi) dari hasil berkebun keluarganya telah mampu memenuhi kebutuhan karbohidrat bagi orang-orang di rumahnya. Anak-anak di kampung Reni, Sona, dan Purigi merupakan sebuah kenyataan bahwa sejatinya proses pendidikan informal telah berlangsung secara alami, bahkan proses pendidikan informal tersebut telah berlangsung lama sebelum sekolah formal dalam bentuk gedung-gedung didirikan di kampung Reni, Sona, dan Purigi.

April 2021

Membicarakan kemajuan pendidikan di daerah-daerah terpencil, perlu adanya sikap kedewasaan dan refleksi. Sejak Indonesia merdeka, proses pendidikan nasional selalu dirumuskan oleh para pemangku kebijakan dan praktisi, yang notabene mereka tidak sepenuhnya hadir di kampung-kampung yang sedang mereka narasikan dalam wacana pendidikan. Pendidikan formal untuk daerah-daerah terpencil tidak bisa seutuhnya mengandalkan wacana pendidikan yang dirumuskan secara nasional, yang karakteristiknya tidak mengakomodasi segala realitas dan kearifan lokal yang telah hidup sangat lama di daerah-daerah terpencil. Pendidikan formal yang hadir di daerah terpencil disamaratakan dengan gaya pendidikan yang berlangsung di kota-kota besar atau di daerah-daerah yang telah mapan dengan segala sarana dan prasarana modern. Proses pendidikan hari ini, tidak memberikan ruang yang cukup luas untuk masyarakat lokal berkontribusi dalam proses pendidikan formal yang berada di kampungnya. Setiap tenaga pendidik yang datang ke daerah-daerah terpencil secara pikiran dan gaya mendidik telah diatur sedemikian rupa selama ia menjalani pendidikan keguruannya untuk mengatur dan mengarahkan setiap peserta didik sesuai dengan standar pendidikan nasional, lalu cara kerjanya diatur melalui bantuan kurikulum nasional untuk menciptakan peserta didik yang terstandar secara kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.

Kita perlu mengingat kembali tentang hakikat pendidikan formal yang telah hadir di negara kita. Secara histori titik awal pendidikan formal mulai massif digalakkan, saat Belanda pada waktu itu memberlakukan politik etis kepada rakyat Hindia Belanda, yang salah satu poin dalam politik etis tersebut memberikan akses kepada sebagian masyarakat untuk mendapatkan kesempatan merasakan pendidikan formal secara utuh, baik untuk bersekolah di negeri sendiri bahkan bisa bersekolah sampai di negeri Belanda. Politik Etis menjadi bumerang kala itu untuk pemerintahan Hindia Belanda, rakyat yang mendapatkan pola pendidikan formal akhirnya mulai bersatu untuk menganalisis bahwa kehadiran Belanda di nusantara merupakan bentuk penjajahan yang harus dilawan, dampak dari proses pendidikan formal telah mendorong kesadaran untuk mendirikan organisasi-organisasi pergerakan. Lalu bermunculanlah tokoh-tokoh pergerakan yang akhirnya bisa menyatukan suara hati nurani rakyat untuk mewujudkan kemerdekaan. Dari histori pendidikan bangsa ini, kita dapat merefleksikan bahwa hakikat dari pendidikan formal merupakan cara untuk setiap individu dan komunitasnya dapat bersama-sama hidup dan berkembang ke arah lebih baik sesuai filosofi kehidupan yang selaras dengan kesadarannya.

April 2021

Bagaimana mungkin kita hari ini bisa mengatakan bahwa proses pendidikan formal di daerah-daerah terpencil yang sedang berlangsung sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat lokal, sedangkan buku-buku yang disediakan saja di sekolah-sekolah merupakan buku-buku yang berisi tentang kehidupan perkotaan, hingga format kurikulum yang mengatur proses pendidikan berkonsep menyamaratakan standar kehidupan dengan pola dan bentuk yang sama, padahal anak-anak di daerah terpencil lebih dekat dengan lautan, hutan belantara, atau sungai, tetapi setiap hari mereka dicekoki dengan kereta, gedung-gedung megah di Jakarta, atau seputar makanan cepat saji seperti mie instan.

Untuk menghadirkan pendidikan formal yang berkualitas di daerah terpencil, perlu ada beberapa langkah progresif yang dilakukan. **Pertama**, pendidikan di daerah terpencil mesti dikonsepsikan berdasarkan data riset, bukan dikonsepsikan hanya berdasar kebutuhan dan tuntutan kurikulum nasional. Kita akhirnya selalu bercita-cita ingin memiliki pendidikan yang berkualitas, tetapi lupa dan malas untuk melakukan riset, kita bercita-cita ingin sampai ke bulan dengan pesawat yang kita buat, tetapi lupa bahwa kelaparan dan illegal logging masih marak terjadi di nusantara, kita hidup seperti bangsa yang lupa diri, bercita-cita luhur tetapi lupa bahwa masih banyak hal-hal dasar mendesak yang harus diselesaikan. Riset menjadi langkah awal untuk merumuskan pendidikan berkualitas di daerah terpencil. Desain riset yang dilakukan berkaitan dengan:

1. Realitas yang terjadi di daerah terpencil tidak sama dengan perkotaan
2. Daerah terpencil memiliki dinamika masalah yang berbeda dengan perkotaan
3. Daerah terpencil memiliki potensi (alam, sosial, keagamaan, dll.) yang berbeda dengan perkotaan
4. Untuk apa dan untuk siapa jika anak-anak di daerah terpencil melakukan pembelajaran di sekolah formal.

Keempat poin riset tersebut merupakan poin dasar, sisanya bisa dikembangkan sesuai kebutuhan. Jika kita mengedepankan poin-poin riset tersebut untuk merumuskan program pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil, setidaknya kita menempatkan pikiran dan hati kita untuk mendengar suara harapan dari masyarakat lokal. Pendidikan formal yang baik harus dilaksanakan dengan dasar kolaborasi yang relevan dengan realitas dan pola pendidikan informal yang telah berlangsung di masyarakat lokal.

April 2021

Misalnya, seorang anak yang hidup di daerah kepulauan, ia memiliki tuntutan untuk bisa bertahan hidup dengan sumber daya laut yang telah tersedia, begitu pun ia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya lautnya untuk tetap terjaga dan lestari. Kita lihat realitas tersebut ke Pulau Reni, di Raja Ampat, masyarakat mulai membangun rumah-rumahnya dengan semen dan pondasi batu, padahal di pulau Reni, tidak terdapat bebatuan untuk dijadikan bahan pondasi rumah, sehingga masyarakat menggunakan batu karang di laut untuk membuat pondasi rumah. Kita bisa membayangkan betapa akan sangat hancurnya ekosistem di perairan laut Pulau Reni jika hal tersebut terus dibiarkan. Realitas tersebut tidak dijadikan topik pembelajaran pada pendidikan formal yang berlangsung di Pulau Reni, pola pendidikan tersebut telah terlepas dari realitas lingkungannya, tidak ada relevansinya. Realitas seperti masyarakat membuat pondasi rumah dengan menggunakan batu karang laut malah tidak hadir dalam dialog pembelajaran antar guru-murid di kelas-kelas, pendidikan formal tidak memberikan peranan dalam menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk dapat mengerti betapa akan sangat hancurnya lautan mereka aktivitas menggunakan karang laut untuk membuat pondasi rumah tetap berlangsung. Narasi tersebut merupakan sebuah contoh untuk memberikan gambaran mengenai format pendidikan formal yang tidak berdasar pada realitas yang terjadi di daerah terpencil, sehingga kehadiran sekolah tidak memiliki dampak signifikan secara kolektif untuk keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

Kedua, proses pembelajaran di sekolah berdasarkan pada realitas yang kontekstual, proses tersebut dapat melibatkan potensi wilayah dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat, segala permasalahan dan potensi wilayah dijadikan topik dan bahan kajian pembelajaran. Hal ini sebagai upaya untuk merelevansikan antara apa yang sedang dipelajari oleh si anak dengan apa yang sedang mereka alami dalam kehidupannya sehari-hari. Menjadikan realitas hidup si anak sebagai bahan kajian pembelajaran akan membuat si anak mengerti bahwa realitasnya merupakan bagian yang penting untuk ia pelajari. Dengan si anak mempelajari realitasnya, maka si anak ada pada tahap awal untuk berkontribusi dalam menyelesaikan segala permasalahan di daerahnya. Keterlibatan unsur lokal dalam proses pendidikan formal merupakan sebuah bentuk kolaborasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat, masyarakat perlu dilibatkan, seperti pemerintah kampung, pengurus keagamaan, pelaku ekonomi, atau kepala suku sekalipun. Pendidikan formal bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan guru, tetapi tanggung jawab bersama.

April 2021

Misalnya, seorang anak yang hidup di daerah kepulauan, ia memiliki tuntutan untuk bisa bertahan hidup dengan sumber daya laut yang telah tersedia, begitu pun ia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya lautnya untuk tetap terjaga dan lestari. Kita lihat realitas tersebut ke Pulau Reni, di Raja Ampat, masyarakat mulai membangun rumah-rumahnya dengan semen dan pondasi batu, padahal di pulau Reni, tidak terdapat bebatuan untuk dijadikan bahan pondasi rumah, sehingga masyarakat menggunakan batu karang di laut untuk membuat pondasi rumah. Kita bisa membayangkan betapa akan sangat hancurnya ekosistem di perairan laut Pulau Reni jika hal tersebut terus dibiarkan. Realitas tersebut tidak dijadikan topik pembelajaran pada pendidikan formal yang berlangsung di Pulau Reni, pola pendidikan tersebut telah terlepas dari realitas lingkungannya, tidak ada relevansinya. Realitas seperti masyarakat membuat pondasi rumah dengan menggunakan batu karang laut malah tidak hadir dalam dialog pembelajaran antar guru-murid di kelas-kelas, pendidikan formal tidak memberikan peranan dalam menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk dapat mengerti betapa akan sangat hancurnya lautan mereka aktivitas menggunakan karang laut untuk membuat pondasi rumah tetap berlangsung. Narasi tersebut merupakan sebuah contoh untuk memberikan gambaran mengenai format pendidikan formal yang tidak berdasar pada realitas yang terjadi di daerah terpencil, sehingga kehadiran sekolah tidak memiliki dampak signifikan secara kolektif untuk keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

Ketiga, proses pendidikan bermuara pada pembentukan kesadaran kolektif, karena setiap komunitas masyarakat memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan. Narasi tersebut mesti menjadi konsentrasi pada proses pembelajaran di sekolah. Kehadiran sekolah di daerah terpencil bukan untuk menjadi lembaga paling benar dan inovatif, tetapi menjadi lembaga yang membantu setiap generasi muda di daerah untuk tumbuh kesadarannya bahwa dengan bersekolah maka keberlangsungan hidup yang selaras dan sejahtera di kampungnya akan bisa dilakukan. Hari ini, asosiasi terhadap daerah terpencil selalu tertuju pada ketertinggalan atau hal-hal lainnya yang memiliki citra tidak modern. Padahal, komunitas masyarakat di daerah terpencil memiliki cara-cara adaptasi yang baik dalam mempertahankan kehidupan. Tidak perlu adanya perahu fiber sumbangan dana otonomi khusus bagi masyarakat di Pulau Dorehkar di Raja Ampat, karena mereka secara gotong royong bisa membuat perahu berukuran besar yang terbuat dari kayu besi dan diberinama perahu belang. Suatu keterampilan yang telah membuat masyarakat Biak bisa bermigrasi dari Pulau Biak hingga ke pulau-pulau terkecil di sepanjang garis pantai bagian utara pulau Papua.

April 2021

Pendidikan formal mesti bisa menangkap suatu realitas yang gigih dari kehidupan masyarakat di daerah. Pendidikan di daerah bisa dikatakan berhasil jika konsep pendidikan yang diusung merupakan konsep pendidikan yang mengkolaborasikan antara ilmu-ilmu modern dengan segala kearifan lokal yang telah terbentuk di masyarakat. Dengan mengkolaborasikan kedua unsur tersebut, pendidikan formal akan datang dengan pola pendidikan modern tetapi tetap dilaksanakan dengan sentuhan kontekstual. Jika hal tersebut dapat terjadi, maka pendidikan formal hadir di daerah terpencil sebagai usaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat serta dapat menggali potensi wilayah untuk memberikan dampak baik bagi kehidupan masyarakat dan lingkungannya.